

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Hampir sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Pentingnya komoditas ini menjadikan sebagai acuan dalam menilai kesejahteraan masyarakat serta kadang dijadikan juga sebagai acuan dalam menilai kondisi sosial politik masyarakat. Beras merupakan komoditas pangan utama masyarakat Indonesia, hampir seluruh penduduk di negara ini mengkonsumsi beras setiap harinya. Hal ini menyebabkan komoditas beras memiliki nilai yang sangat strategis, selain karena menguasai hajat hidup orang banyak, juga dapat dijadikan parameter stabilitas ekonomi dan sosial negara. Apabila terjadi kelangkaan atau tidak terpenuhinya kebutuhan beras pada masyarakat, akan berdampak pada inflasi dan gejolak sosial (Rohman & Maharani, 2018).

Peran masyarakat dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan beras di Indonesia. Salah satu cara untuk meningkatkan peran masyarakat guna menjaga ketersediaan beras adalah tetap menanam padi dan meningkatkan hasil produksinya. Sedangkan peran pemerintah adalah menjaga ketersediaan bahan-bahan pendukung bagi petani guna melakukan produksi beras. Salah satu pendukung yang dapat meningkatkan produksi adalah pupuk. Pupuk merupakan bahan kimia yang memiliki peran penting dalam membantu pertumbuhan tanaman. Akan tetapi harganya yang mahal membuat petani sedikit mengurangi porsi pembelian pupuk yang mana hal tersebut akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Berbagai langkah mulai ditempuh oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pangan seperti, subsidi input produksi, kebijakan harga dan pembenahan kelembagaan pangan. Salah satu kebijakan melalui subsidi input produksi yaitu kebijakan subsidi pupuk (Katarina Hildegardi Estriana Nino et al., 2022).

Kebijakan subsidi pupuk merupakan salah satu kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan pada petani. Menurut Syafa'at (2006) dan Rachman (2017) subsidi pupuk merupakan salah satu upaya pemerintah agar petani dapat mengakses kebutuhan pupuk untuk usaha taninya dengan harga yang lebih

terjangkau, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi pertanian guna tercapainya ketahanan pangan.

Harga pupuk yang relatif murah memungkinkan petani untuk memupuk secara cukup sehingga mampu meningkatkan produksi dan produktivitas, sehingga ada korelasi antara nilai subsidi pupuk dengan produksi dan produktivitas padi. Adapun nilai subsidi pupuk dengan disertai data produksi dan produktivitas padi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Nilai Subsidi Pupuk, Produksi dan Produktivitas Padi di Indonesia Pada Tahun 2018 – 2021

Tahun	Nilai subsidi pupuk (triliun rupiah)	Pertumbuhan (%)	Produksi (ton)	Pertumbuhan (%)	Produktivitas (ton/ha)	Pertumbuhan (%)
2018	33,6	-	59.199,393	-	5,92	-
2019	37,1	10,42	54.607,277	-7,76	5,33	-9,97
2020	26,6	-28,30	54.650.506	0,08	5,41	1,50
2021	27,2	2,26	54.415,294	-0,43	5,23	-3,33
Rata-rata		-5,21		-2,70		-3,93

Sumber : BPS (2022).

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa pada tahun 2019 nilai subsidi mengalami peningkatan namun mengalami penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Peningkatan nilai subsidi pupuk pada tahun 2019 ternyata menyebabkan penurunan produksi dan produktivitas padi di Indonesia. Sedangkan pada tahun 2020 dengan nilai subsidi pupuk yang menurun menyebabkan peningkatan produksi dan produktivitas padi di Indonesia. Sementara itu, pada tahun 2021 nilai subsidi pupuk mengalami peningkatan namun produktivitas dan produksi padi kembali mengalami penurunan.

Berdasar Tabel 1.1 terlihat bahwa nilai subsidi pupuk mempengaruhi produksi dan produktivitas padi. Ketika nilai subsidi mengalami peningkatan maka jumlah produksi dan produktivitas mengalami penurunan yang disebabkan oleh ketidak efisienan dalam penggunaannya. Sementara itu, ketika nilai subsidi pupuk mengalami penurunan maka jumlah produksi dan produktivitas padi meningkat yang disebabkan oleh penggunaan pupuk sesuai anjuran. Penetapan anjuran akan berbeda antar daerah karena akan mempertimbangkan kebutuhan hara tanaman, cadangan hara yang ada di dalam tanah, dan target hasil realistik

yang ingin dicapai oleh setiap daerah yang ada di Indonesia, sehingga penggunaan setiap daerah pun akan sangat beragam sesuai dengan keadaan spesifik lokasi tersebut.

Pada tahun 2022 pemerintah melalui peraturan kebijakan Peraturan Menteri Pertanian No 10 tahun 2022 mulai membatasi pemberian pupuk subsidi, oleh karena itu maka peneliti ingin melakukan menganalisis tentang pengaruh kebijakan subsidi pupuk terhadap penggunaan pupuk di Kecamatan Sukorambi Jember. Tujuannya untuk mengetahui perbandingan apakah adanya kebijakan pupuk subsidi akan memberikan pengaruh terhadap penggunaan pupuk dan produktivitas di Kecamatan Sukorambi Jember.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan penggunaan pupuk organik sebelum dan sesudah perubahan kebijakan subsidi pupuk?
2. Bagaimana perbandingan penggunaan pupuk anorganik sebelum dan sesudah perubahan kebijakan subsidi pupuk?
3. Apa ada perbedaan produktivitas sebelum dan sesudah perubahan kebijakan subsidi pupuk?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbandingan penggunaan pupuk organik sebelum dan sesudah perubahan kebijakan subsidi pupuk
2. Untuk mengetahui perbandingan penggunaan pupuk anorganik sebelum dan sesudah perubahan kebijakan subsidi pupuk
3. Untuk menganalisis perbedaan produktivitas sebelum dan sesudah perubahan kebijakan subsidi pupuk

1.4 Manfaat Penelitian

1. Menambah ilmu pengetahuan di bidang sosial ekonomi pertanian
2. Sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang berkenaan dengan subsidi pupuk
3. Sebagai bahan informasi dan referensi dalam penelitian sejenis atau penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang

